



BAGIAN ANGGARAN 089



LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

**PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

NOMOR : KU.02/LPP-68/JF/04/2023
TANGGAL : 3 MEI 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPKP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, Mei 2023

Kepala Pusat,

Iwan Agung Prasetyo
NIP 19740414 199402 1 001

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	20
B.2. Belanja Negara	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar	27
C.2. Aset Tetap	27
C.3. Aset Lainnya	30
C.4. Ekuitas	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	33
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
E.1. Ekuitas Awal	40
E.2. Surplus/(Defisit) LO	40
E.3. Transaksi Antar Entitas	40
E.4. Ekuitas Akhir	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja	42
F.2. Informasi Dana Pinjaman Luar Negeri	42
F.3. Informasi Dana Hibah Luar Negeri	47

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 1	: Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2022 dan 2021	20
Tabel 2	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2022	21
Tabel 3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2022	21
Tabel 4	: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021	22
Tabel 5	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022	23
Tabel 6	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021	23
Tabel 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2022	24
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021	24
Tabel 9	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022	25
Tabel 10	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021	25
Tabel 11	: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	27
Tabel 12	: Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	27
Tabel 13	: Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	28
Tabel 14	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022	30
Tabel 15	: Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	30
Tabel 16	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021	33
Tabel 17	: Rincian Beban Operasional TA 2022 dan 2021	33
Tabel 18	: Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021	34
Tabel 19	: Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021	34
Tabel 20	: Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021	35
Tabel 21	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 Menurut LO dan LRA	36
Tabel 22	: Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021	36
Tabel 23	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 Menurut LO dan LRA	37
Tabel 24	: Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021	37
Tabel 25	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021	38
Tabel 26	: Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19	38
Tabel 27	: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan 2021	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok
 - A. Neraca Percobaan
 - B. Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Neraca
 - D. Laporan Operasional
 - E. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
4. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN
5. Daftar Persediaan – SIMAK BMN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2022 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023

Kepala Pusat,



Iwan Agung Prasetyo
NIP. 19740414 199402 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara s.d. 31 Desember 2022 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp42.542.159,00. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor tidak membuat estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.072.697.131,00 atau mencapai 98,24 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp21.450.057.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.753.239.953,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp33.274.179,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp1.153.378.847,00, dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp566.586.927,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp0,00 dan Rp1,753,239,953,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Surplus/(Defisit) LO sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp20,787,651,283,00. Jumlah tersebut terdiri atas:

- Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar minus Rp20.830.193.442,00 yang merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp20.830.193.442,00.

- Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp42.542.159,00, merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp42.542.159,00 dikurangi dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp2.007.898.407,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp20.787.651.283,00, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp20.532.992.829,00 sehingga Ekuitas Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp1.753.239.953,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNSIONAL AUDITOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

U R A I A N	CATA-TAN	TAHUN ANGGARAN 2022			TA 2021 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI THD ANGGARAN	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	42.542.159	-	13.821.646
Jumlah Pendapatan		-	42.542.159	-	13.821.646
BELANJA	B.2				
Rupiah Murni		18.469.788.000	18.175.245.815	98,41	17.687.030.165
■ Belanja Pegawai		15.250.960.000	14.985.267.913	98,26	14.261.995.085
■ Belanja Barang		3.106.137.000	3.077.331.026	99,07	3.274.152.080
■ Belanja Modal		112.691.000	112.646.876	99,96	150.883.000
Pinjaman Luar Negeri		2.878.506.000	2.824.922.539	98,14	-
■ Belanja Pegawai		-	-	-	-
■ Belanja Barang		1.767.056.000	1.728.940.206	97,84	-
■ Belanja Modal		1.111.450.000	1.095.982.333	98,61	-
Hibah Luar Negeri		101.763.000	72.528.777	71,27	-
■ Belanja Pegawai		-	-	-	-
■ Belanja Barang		101.763.000	72.528.777	71,27	-
■ Belanja Modal		-	-	-	-
Jumlah Belanja		21.450.057.000	21.072.697.131	98,24	17.687.030.165
■ Belanja Pegawai	B.2.1	15.250.960.000	14.985.267.913	98,26	14.261.995.085
■ Belanja Barang	B.2.2	4.974.956.000	4.878.800.009	98,07	3.274.152.080
■ Belanja Modal	B.2.3	1.224.141.000	1.208.629.209	98,73	150.883.000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2022	31 DES 2021
ASET			
ASET LANCAR			
■ Persediaan	C.1.1	33.274.179	76.509.645
JUMLAH ASET LANCAR		33.274.179	76.509.645
ASET TETAP			
■ Peralatan dan Mesin	C.2.1	5.923.722.433	5.751.971.853
■ Akumulasi Penyusutan	C.2.2	(4.770.343.586)	(4.576.239.117)
JUMLAH ASET TETAP		1.153.378.847	1.175.732.736
ASET LAINNYA			
■ Aset Tak Berwujud	C.3.1	1.889.112.550	1.813.057.068
■ Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.3.2	0	291.000.000
■ Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.322.525.623)	(1.348.401.042)
JUMLAH ASET LAINNYA		566.586.927	755.656.026
JUMLAH ASET		1.753.239.953	2.007.898.407
EKUITAS			
■ Ekuitas	C.4.1	1.753.239.953	2.007.898.407
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.753.239.953	2.007.898.407

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2022	31 DES 2021
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1		
■ Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	0	617.134
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1)	D.1.1	0	617.134
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
■ Beban Pegawai	D.1.2.1	14.985.267.913	14.261.995.085
■ Beban Persediaan	D.1.2.2	123.312.399	77.954.690
■ Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	1.788.755.437	1.610.055.443
■ Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	184.500.597	114.253.604
■ Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	2.827.165.342	1.423.038.613
■ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	921.191.754	1.170.604.208
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)		20.830.193.442	18.657.901.643
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2)		(20.830.193.442)	(18.657.284.509)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2.1.		
■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.1	42.542.159	13.204.512
Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.1)		42.542.159	13.204.512
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1)		42.542.159	13.204.512
SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2)		(20.787.651.283)	(18.644.079.997)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2022	31 DES 2021
EKUITAS AWAL	E.1	2.007.898.407	2.698.329.156
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	E.2	(20.787.651.283)	(18.644.079.997)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3		
■ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.3.1	21.072.697.131	17.687.030.165
■ Diterima dari Entitas Lain	E.3.2	(42.542.159)	(13.821.646)
■ Transfer Keluar	E.3.3	(497.162.143)	0
■ Transfer Masuk	E.3.4	0	280.440.729
Jumlah Transaksi Antar Entitas		20.532.992.829	17.953.649.248
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3)		(254.658.454)	(690.430.749)
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	E.4	1.753.239.953	2.007.898.407

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan
Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

↳ Kepala Pusat : Iwan Agung Prasetyo
↳ Koordintor Pengembangan Pembinaan dan : Sindu Senjaya Aji
Fasilitasi
↳ Koordinator Sertifikasi dan Pengelolaan : Nirwikoro
Data
↳ Koordinator Program dan Evaluasi : Agus Yulianto
↳ Kepala Sub Bagian Umum : Aries Sulastowo

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Seiring dengan pelaksanaan *roll out* SAKTI *full module* untuk seluruh K/L pada tahun 2022, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja telah sepenuhnya menggunakan SAKTI kelompok modul pelaporan (modul persediaan, modul asset tetap, modul piutang, serta modul *general ledger* dan pelaporan/GLP)

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat

ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017

dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang

dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

Piutang Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan

tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp19.499.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp17.044.409,00 untuk pembelian lisensi zoom.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2022 semula sebesar Rp17.488.534.000,00. Pada bulan Maret 2022 dilakukan revisi anggaran sehubungan luncuran anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) TA 2021 dan tambahan anggaran PLN tahun 2022 sebesar Rp2.878.506.000,00. Pada bulan Agustus dilakukan revisi anggaran sehubungan luncuran anggaran Hibah Luar Negeri TA 2021 sebesar Rp101.763.000,00. Pada bulan Oktober dilakukan revisi anggaran sehubungan pemanfaatan sisa anggaran berupa penambahan anggaran belanja pegawai dan layanan sarana prasarana internal sebesar Rp981.254.000,00 sehingga anggaran setelah revisi menjadi Rp21.450.057.000,00.

Rincian Pagu Belanja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran Belanja
Anggaran Semula	14.402.600.000	3.085.934.000	0	17.488.534.000
Luncuran anggaran PLN 2021 dan tambahan anggaran 2022	0	1.078.147.000	1.800.359.000	2.878.506.000
Revisi anggaran sehubungan perubahan jenis belanja	0	1.000.000.000	(1.000.000.000)	0
Luncuran anggaran HLN 2021	0	101.763.000	0	101.763.000
Revisi Pemanfaatan Sisa Anggaran (DIA)	848.360.000	20.203.000	112.691.000	981.254.000
Revisi anggaran sehubungan perubahan jenis belanja		(311.091.000)	311.091.000	0
Anggaran Akhir	15.250.960.000	4.974.956.000	1.224.141.000	21.450.057.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Program Pengawasan Pembangunan	1.962.684.000	4.942.953.000
Program Dukungan Manajemen	15.525.850.000	16.507.104.000
Total	17.488.534.000	21.450.057.000

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp42.542.159

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.542.159,00. Keseluruhan Pendapatan Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp28.720.513,00 atau 207.79 persen dibandingkan realisasi PNBP Tahun 2021 sebesar Rp13.821.646,00 disebabkan peningkatan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL.

Perbandingan realisasi PNBP Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2022 dan 2021

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2022	TA 2021	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	617.134	(617.134)	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	42.542.159	4.516.636	38.025.523	841,90
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8.687.876	(8.687.876)	(100)
Total	42.542.159	13.821.646	28.720.513	207,79

Realisasi Belanja
Negara
Rp21.072.697.131

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Tahun 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp21.072.697.131,00 atau 98,24 persen dari anggaran sebesar Rp21,450,057,000,00. Pengembalian belanja tahun 2022 sebesar Rp23.477.367,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2022

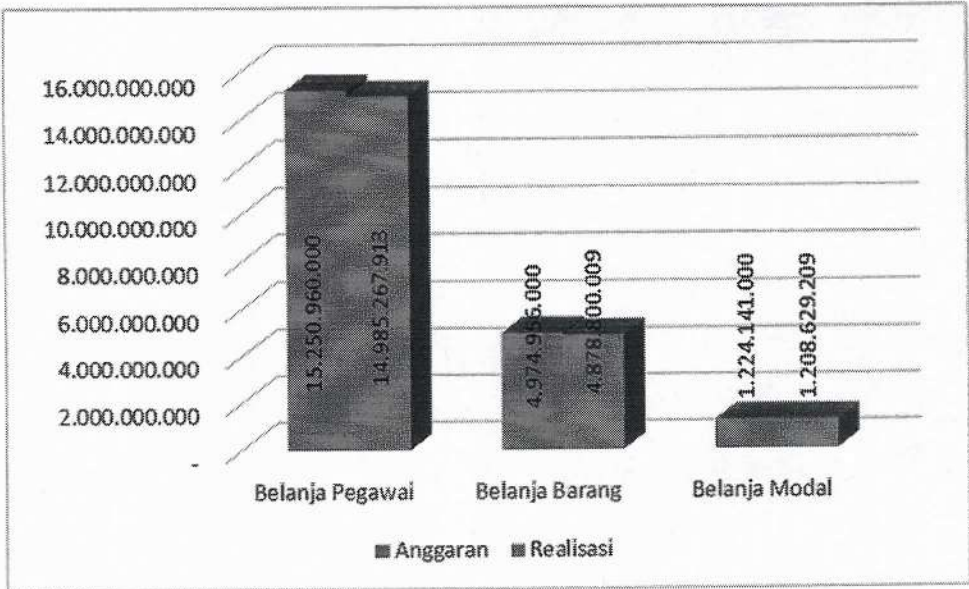
Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
CH	Program Pengawasan Pembangunan	4.942.953.000	4.848.584.822	98,09
WA	Program Dukungan Manajemen	16.507.104.000	16.224.112.309	98,29
Jumlah		21.450.057.000	21.072.697.131	98,24

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja TA 2022

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	15.250.960.000	14.985.267.913	98,26
52	Belanja Barang	4.974.956.000	4.878.800.009	98,07
53	Belanja Modal	1.224.141.000	1.208.629.209	98,73
Jumlah		21.450.057.000	21.072.697.131	98,24

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Realisasi belanja TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.385.666.966,00 atau 19,14% dibandingkan realisasi belanja Tahun 2021 disebabkan meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi paska pandemi Covid-19 di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
		TA 2022	TA 2021	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	14.985.267.913	14.261.995.085	723.272.828	5,07
52	Belanja Barang	4.878.800.009	3.274.152.080	1.604.647.929	49,01
53	Belanja Modal	1.208.629.209	150.883.000	1.057.746.209	701,04
	Total	21.072.697.131	17.687.030.165	3.385.666.966	19,14

Belanja Pegawai
Rp14.985.267.913

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.985.267.913,00 dan Rp14.261.995.085,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunj PNS	6.928.443.000	6.910.458.446	99,74
Belanja Lembur	90.851.000	78.967.000	86,92
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	8.231.666.000	7.995.842.467	97,14
Total	15.250.960.000	14.985.267.913	98,26

Realisasi belanja pegawai (netto) sebesar Rp14.985.267.913,00 berasal dari belanja bruto (bruto) sebesar Rp14,998,789,910,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp13.521.997,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2021, terdapat peningkatan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp723,272.828,00 atau 5,07 persen disebabkan terdapatnya penambahan pegawai Pusbin JFA (mutasi dari unit lain ke Pusbin JFA) dan adanya kenaikan pangkat pegawai yang mempengaruhi peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2022	TA 2021	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.910.458.446	6.761.880.057	148.578.389	2,20
Belanja Lembur	78.967.000	34.799.000	44.168.000	126,92
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	7.995.842.467	7.465.316.028	530.526.439	7,11
Total	14.985.267.913	14.261.995.085	723.272.828	5,07

Belanja Barang
Rp4.878.800.009

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.878.800.009,00 dan Rp3.274.152.080,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2022 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	446.733.000	442.451.216	99,04
Belanja Barang Non Operasional	1.157.425.000	1.147.770.970	99,17
Belanja Barang Persediaan	80.441.000	80.400.933	99,95
Belanja Jasa	234.918.000	196.834.951	83,79
Belanja Pemeliharaan	196.230.000	184.176.597	93,86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.859.209.000	2.827.165.342	98,87
Total	4.974.956.000	4.878.800.009	98,07

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp4.878.800.009,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp4.888.755.379,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp9.955.370,00.

Dibandingkan dengan realisasi TA 2021, terdapat peningkatan realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.604.647.929,00 atau 49,01 persen antara lain disebabkan meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi paska pandemi Covid-19 di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Perbandingan realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2022	TA 2021	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	442.451.216	387.912.089	54.539.127	14,06
Belanja Barang Non Operasional	1.147.770.970	1.132.643.354	15.127.616	1,34
Belanja Barang Persediaan	80.400.933	128.307.920	(47.906.987)	(37,34)
Belanja Jasa	196.834.951	89.500.000	107.334.951	119,93
Belanja Pemeliharaan	184.176.597	112.750.104	71.426.493	63,35
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.827.165.342	1.423.038.613	1.404.126.729	98,67
Total	4.878.800.009	3.274.152.080	1.604.647.929	49,01

Dalam realisasi Belanja Barang TA 2022 sebesar Rp4.878.800.009,00 termasuk realisasi dari Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp2.824.922.539,00 atau 57,90% dari total realisasi Belanja Barang dan realisasi Hibah Luar Negeri sebesar Rp 72.528.777,00 atau 1,49 dari total realisasi Belanja Barang.

Belanja Modal
Rp1.208.629.209

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.208.629.209,00 dan Rp150.883.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	582.861.000	582.808.009	99,99
Belanja Modal Lainnya	641.280.000	625.821.200	97,59
Total	1.224.141.000	1.208.629.209	98,73

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, terdapat peningkatan realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.057.746.209,00 atau 701,04 persen antara lain disebabkan adanya realisasi TIK Sibijak atau IT Equipment Pengembangan SIBIJAK (Equipment, hardware & software) yang merupakan hasil revisi luncheon anggaran TA 2021 ke TA 2022. Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2022	TA 2021	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	582.808.009	150.883.000	431.925.009	286,26
Belanja Modal Lainnya	625.821.200	0	625.821.200	-
Total	1.208.629.209	150.883.000	1.057.746.209	701,04

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp1.208.629.209,00 telah dicatat sebagai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Aset Tak Berwujud.

Dalam pengadaan TIK Sibijak atau IT Equipment Pengembangan SIBIJAK (Equipment, hardware & software) menghasilkan barang ektrakomptabel berupa 2 buah monitor headphone dengan nilai sebesar 1.698.300,00.

B.2.4 Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp19.499.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp17.044.409,00 atau 87,41% berupa pembelian lisensi zoom, dengan rincian sebagai berikut:.

Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian Akun (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%tase
521241	Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid - 19	19.499.000	17.044.409	87,41
	Total	19.499.000	17.044.409	87,41

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 terdapat penurunan realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp48.350.983,00. Perbandingan realisasi Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 dan 2020 disajikan sebagai berikut

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2022	TA 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid - 19	17.044.409	65.395.392	(48.350.983)	(73,94)
Total	17.044.409	65.395.392	(48.350.983)	(73,94)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp33.274.179

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp33.274.479,00 dan Rp76.509.645,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Aset Lancar	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1.	Persediaan	33.274.179	76.509.645
	Jumlah	33.274.179	76.509.645

Persediaan
Rp33.274.179

C.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp33.274.179,00 dan Rp76.509.645,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kode	Jenis Persediaan	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
117111	Barang Konsumsi	33.274.179	76.509.645
	Jumlah	33.274.179	76.509.645

Persediaan senilai Rp33.274.179,00 berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp1.153.378.847

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.153.378.847,00 dan Rp1.175.732.736,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	5.923.722.433	5.751.971.853
	Akumulasi Penyusutan	(4.770.343.586)	(4.576.239.117)
	Nilai Buku	1.153.378.847	1.175.732.736

Peralatan dan
Mesin
Rp5.923.722.433

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.923.722.433,00 dan Rp5.751.971.853,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.153.378.847,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	5.751.971.853
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	581.109.709
Mutasi Kurang	
- Penghentian Aset dari Penggunaan	409.359.129
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5.923.722.433
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(4.770.343.586)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.153.378.847

Transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp 581.109.709,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	LCD Projector/Infocus	6	97.685.550
2	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	2.019.000
3	Televisi	2	54.415.800
4	Microphone	1	4.479.405
5	Microphone Table Stand	4	13.388.134
6	Voice Recorder	1	1.504.605
7	Tripod Camera	1	1.298.700
8	Monopod	1	15.683.190
9	Clipp on	2	10.373.393
10	Camera Conference	1	5.320.230
11	Telephone Mobile	1	4.606.722
12	Lighting Equipment	1	4.484.400
13	Kamera Digital	1	60.060.000

14	P.C. Unit	4	138.795.950
15	Lap Top	2	71.678.000
16	Tablet PC	2	10.695.960
17	Hard Disk	6	29.700.000
18	Speaker Komputer	1	16.192.680
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	14.089.320
20	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	16.025.070
21	Peralatan Komputer Lainnya	2	8.613.600
Jumlah			581.109.709

- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp409.359.129,00 merupakan perubahan kondisi BMN rusak berat yang semula dari Peralatan dan Mesin berubah menjadi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

Didalam nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.923.722.433,00 terdapat Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp37.291.000,00.

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak dicatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp37.986.300,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin Ektrakomptabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	16,086,000
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	21.900.300
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	37,986,300
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(15,801,032)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	22,185,268

Pembelian sebesar Rp21.900.300,00 berupa realisasi belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Realisasi Belanja 53 (Rp)	Nilai Realisasi Belanja 52 (Rp)
1	Headphone	-	20.202.000
2	Monitor Headphone	1.698.300	-
Jumlah		1.698.300	20.202.000

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp4.770.343.586)

C.2.2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.770.343.586,00 dan Rp4.576.239.117,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	5.923.722.433	4.770.343.586	1.153.378.847
	Jumlah	5.923.722.433	4.927.799.688	1.153.378.847

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2021 (Rp)	Saldo per 31/12/2022 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	4.576.239.117	4.770.343.586	194.104.469	194.104.469	0
	Total	4.576.239.117	4.770.343.586	194.104.469	194.104.469	0

Aset Lainnya
Rp566.586.927

C.3. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp566.586.927,00 dan Rp755.656.026,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	1.889.112.550	1.813.057.068
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	291.000.000
	Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	(1.322.525.623)	(1.348.401.042)
	Nilai Buku	566.586.927	755.656.026

Aset Tak Berwujud
Rp1.889.112.550

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.889.112.550,00 dan Rp1.813.057.068,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.322.525.623,00 dan Rp1.348.401.042,00. sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp566.586.927,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa *Software* dan lisensi.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.813.057.068
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	625.821.200
Mutasi Kurang	
- Transfer keluar	549.765.718
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.889.112.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1,322,525,623)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	566.586.921

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut

- Pembelian sebesar Rp625.821.200,00 merupakan realisasi belanja modal atas pembelian software.
- Transfer Keluar sebesar Rp549.765.718,00 merupakan pengeluaran aset dari neraca Pusbin JFA atas transaksi perpindahan aset ke Pusat Penelitian Pengawasan BPKP sebagaimana dijelaskan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0

C.3.2. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp291.000.000,00.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	291.000.000
Mutasi Kurang	
- Transfer keluar	291.000.000
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0

Transfer keluar berupa pemindahan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (aplikasi *E-Risk*) ke Kantor Pusat BPKP.

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp1.322.525.623)

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.322.525.623,00 dan Rp1.348.401.042,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional kantor karena sudah dalam kondisi rusak berat, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut. Saldo per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri atas:

No	Uraian	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.322.525.623	1.348.401.042
	Total	1.322.525.623	1.348.401.042

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2021	Saldo per 31/12/2022	Mutasi (Rp)	Beban Amortisa (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Akum Amort ATB	1.348.401.042	1.322.526.623	25.875.419	25.875.419	0
	Total	1.348.401.042	1.322.526.623	25.875.419	25.875.419	0

Ekuitas
Rp1.753.239.953

C.4. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.753.239.953,00 dan Rp2.007.898.407,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Operasional
(Rp20.830.193.442)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar minus Rp20.830.193.442,00 dan minus Rp18.657.284.509,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp20.830.193.442,00.

Pendapatan
Operasional
Rp0,00

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp617.134,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp0,00

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp617.134,00. Rincian PNBP Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Pemanfaatan BMN	0	617.134	(617.134)	(100,00)
Total	0	617.134	(617.134)	(100,00)

Beban Operasional
Rp20.830.193.442

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp20.830.193.442,00 dan Rp18.657.901.643,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Rincian Beban Operasional Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	14.985.267.913	14.261.995.085	723.272.828	5,07
Beban Persediaan	123.312.399	77.954.690	45.357.709	58,19
Beban Barang dan Jasa	1.788.755.437	1.610.055.443	178.699.994	11,10
Beban Pemeliharaan	184.500.597	114.253.604	70.246.993	61,48
Beban Perjalanan Dinas	2.827.165.342	1.423.038.613	1.404.126.729	98,67
Beban Penyusutan dan Amortisasi	921.191.754	1.170.604.208	(249.412.454)	(21,31)
Total	20.830.193.442	18.657.901.643	2.172.291.799	11,64

Beban Pegawai
Rp14.985.267.913

D.1.2.1 **Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.985.267.913,00 dan Rp14.261.995.085,00. Kenaikan Beban Pegawai tersebut karena adanya penambahan jumlah pegawai, mutase dari unit lain BPKP ke Pusbin JFA serta adanya kenaikan pangkat pegawai.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18
Rincian Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	6.910.458.446	6.761.880.057	148.578.389	2,20
Beban Lembur	78.967.000	34.799.000	44.168.000	126,92
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	7.995.842.467	7.465.316.028	530.526.439	7,11
Total	14.985.267.913	14.261.995.085	723.272.828	5,07

Realisasi beban pegawai menurut LO Tahun 2022 sama dengan realisasi belanja pegawai menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Persediaan
Rp123.312.399

D.1.2.2. **Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp123.312.399,00 dan Rp77.954.690,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	123.312.399	77.954.690	45.357.709	58,18
Total	123.312.399	77.954.690	45.357.709	58,18

Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2022 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp80.400.933,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp123.312.399,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama Tahun 2022.

Beban Barang dan
Jasa
Rp1.788.755.437

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.788.755.437,00 dan Rp1.610.055.443,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	442.451.216	387.912.089	54.539.127	14,06
Beban Barang Non Operasional	1.147.770.970	1.132.643.354	15.127.616	1,34
Beban Jasa	196.834.951	89.500.000	107.334.951	119,93
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.698.300	0	1.698.300	-
Total	1.788.755.437	1.610.055.443	178.699.994	11,10

Jika realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp1.698.300,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	442.451.216	442.451.216	-
Beban Barang Non Operasional	1.147.770.970	1.147.770.970	-
Beban Jasa	196.834.951	196.834.951	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.698.300	0	1.698.300
Total	1.788.755.437	1.787.057.137	1.698.000

Beban Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.698.300,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk pembelian Peralatan dan Mesin yang harga satuannya tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset.

Beban
Pemeliharaan
Rp184.500.597

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp184.500.597,00 dan Rp114.253.604,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	184.176.597	112.750.104	71.426.493	63,35
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	324.000	27.500	296.500	1.078,18
Beban Persediaan Suku Cadang	0	1.476.000	(1.476.000)	(100,00)
Total	184.500.597	114.253.604	70.246.993	61,48

Jika realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp324.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan
Tahun 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	184.176.597	184.176.597	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	324.000	-	324.000
Total	184.500.597	184.176.597	324.000

Selisih sebesar Rp324.000 akibat salah mengkategorikan barang pada saat infut di aplikasi persediaan atau di Sakti modul persediaan, masuk dikategori bahan untuk pemeliharaan, seharusnya masuk di kategori alat bahan kantor untuk kegiatan lainnya.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.827.165.342

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.827.165.342,00 dan Rp1.423.038.613,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	1.717.392.489	798.782.487	918.610.002	115,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	303.980.000	260.600.000	43.380.000	16,65
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	471.452.250	97.778.987	373.673.263	382,16
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	334.340.603	265.877.139	68.463.464	25,75
Total	2.827.165.342	1.423.038.613	1.404.126.729	98,67

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 sama dengan realisasi Belanja menurut LRA pada periode yang sama.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp921.191.754

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp921.191.754,00 dan Rp1.170.604.208,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	603.463.598	729.589.940	(126.126.342)	(17,29)
Beban Amortisasi Software	317.728.156	441.014.268	(123.286.112)	(27,96)
Total	921.191.754	1.170.604.208	(249.412.454)	(21,31)

Beban Khusus
Penanganan
Pandemi
Rp17.044.409

D.1.2.7. Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Beban khusus penanganan pandemi COVID-19 disajikan pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26
Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
521241	Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	19.499.000	17.044.409	87,41
	Total	19.499.000	17.044.409	87,41

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp42.542.159

D.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp42.542.159,00 dan Rp13.204.512,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp42.542.159,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp42.542.159

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar dan Rp42.542.159,00 dan Rp13.204.512,00. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp42.542.159,00 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp42.542.159,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp42.542.159

D.2.1.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp42.542.159,00 dan Rp13.204.512,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 dan 2021 disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel 27
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah (Rp)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	42.542.159	4.516.636	38.025.523	841,90
Penerimaan Kembali B.Barang TAYL	0	8.687.876	(8.687.876)	(100)
Total	42.542.159	13.204.512	29.337.647	222,18

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp2.007.898.407

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.007.898.407,00 dan Rp2.698.329.156,00.

Surplus/(Defisit)
LO
(Rp20.787.651.283)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar minus Rp20.787.651.283,00 dan minus Rp 18.644.079.997,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Transaksi Antar
Entitas
Rp20.532.992.829

E.3. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp20.532.992.829,00 dan Rp17.953.649.248,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri atas:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.072.697.131	17.687.030.165
Diterima dari Entitas Lain	(42.542.159)	(13.821.646)
Transfer Masuk	0	280,440,729
Transfer Keluar	(497.162.143)	0
Total	20.532.992.829	17.953.649.248

Ditagihkan ke
Entitas Lain
Rp21.072.697.131

E.3.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp21.072.697.131,00 dan Rp17.687.030.165,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.

Diterima dari
Entitas Lain
Rp42.542.159

E.3.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp42.542.159,00 dan Rp13.821.646,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada

tanggal neraca.

Transfer Keluar
Rp497.162.143

E.3.3. Transfer Keluar

Jumlah Transfer Keluar per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp497.162.143,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset yang diserahkan ke unit kerja lain di lingkungan BPKP, berupa Software Knowledge Management System dan ATB Dalam Pengerjaan (Aplikasi E-Risk), dengan rincian sebagai berikut:

Satker Pengirim	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Pusat Penelitian Pengembangan Pengawasan BPKP	549.765.718	343.603.575	206.162.143
Kantor Pusat	291.000.000	0	291.000.000
Jumlah	840.765.718	343.603.575	497.162.143

Ekuitas Akhir
Rp1.753.239.953

E.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.753.239.953,00 dan Rp2.007.898.407,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp1.753.239.953,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp0,00.

Biaya Bantuan
Kedinasan

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan

Tidak terdapat realisasi dana penugasan dari pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2022.

F. 2 Informasi Data Pinjaman Luar Negeri

F.2.1. Latar Belakang

State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF) ADB LOAN NO . 3872-INO merupakan proyek lanjutan kerjasama pemerintah Indonesia dan ADB yang dikelola oleh BPKP selaku Executing Agency (EA), dengan tujuan dalam rangka melanjutkan penguatan akuntabilitas sektor publik yang telah dilaksanakan sebelumnya selama periode Februari 2013 sampai dengan Maret 2020 melalui proyek STAR ADB Loan No. 2927-INO. Sumber daya manusia berkualitas di bidang pengelolaan keuangan negara dan internal audit yang terbangun pada proyek STAR sebelumnya akan didukung dengan pengembangan infrastruktur IT dalam mempercepat pelaksanaan proses bisnis pengelolaan keuangan dan internal audit. Selain itu, STAR AF juga bermanfaat untuk mengantisipasi tuntutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baik dalam hal tata kelola, proses bisnis, monev, dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan demikian, fungsi pengelolaan keuangan negara dan audit internal dapat lebih terjamin dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah (Public Finance Management - PFM) yang bersih dan berkualitas.

F.2.2. Tujuan dan Sasaran

Penyelenggaraan State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF) ADB LOAN NO . 3872-INO selama periode 2020-2025 memiliki tiga komponen output, yaitu: (1) capacity of government's internal auditors and public finance officers developed; (2) competency and needs-based e-learning approach

institutionalized; dan (3) institutional strengthening through system improvement. Berkaitan dengan komponen output di atas, terdapat dua poin penting dari penyelenggaraan STAR AF, yang juga relevan dalam melanjutkan pemanfaatan capaian proyek STAR, yaitu:

1. Melanjutkan pengembangan inovasi yang mendukung penguatan peran pembinaan BPKP melalui penerapan organisasi pembelajar bagi APIP dan PKN yang selaras dengan kebutuhan organisasi publik dalam mencapai strategi dan tujuannya. Inovasi yang dimaksud adalah penyelenggaraan GIA Corpu. Capaian STAR berupa pengembangan dan penyelenggaraan Regol (registrasi online) dan e-learning yang merupakan bagian dari proses bisnis learning value chain (LVC) GIA Corpu pada tahap program delivery, dilanjutkan di STAR AF dengan pengembangan secara terintegrasi dari seluruh proses bisnis LVC GIA Corpu, mencakup: (1) learning need diagnostic (mencakup core competency analysis (CCA), developmental need analysis (DNA), training need analysis); (2) desain & pengembangan pembelajaran; (3) penyelenggaraan & implementasi pembelajaran melalui training dan sertifikasi JFA dan non JFA serta diklat teknis substansi; dan (4) evaluasi & pengukuran dampak pembelajaran. Selain itu, capaian STAR lainnya berupa hasil pengembangan SIBIJAK dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan training need analysis GIA Corpu, yaitu dengan memanfaatkan layanan pusat data auditor SIBIJAK untuk mengidentifikasi dan memetakan gap competency APIP tiap K/L/P secara terupdate.
2. Melanjutkan pengembangan inovasi yang mendukung penguatan peran pengawasan sektor publik, yaitu meningkatkan implementasi pengelolaan risiko dan memanfaatkan ICT dalam rangka mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran sektor publik. Pengembangan pengelolaan risiko sektor publik yang didanai STAR AF ini selaras dengan peran BPKP dalam

melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan.

Pada pengawasan keuangan, penerapan pengelolaan risiko direalisasikan melalui pengembangan FMIS-NG yang berbasis web dan mengintegrasikan seluruh sub-sistemnya serta melengkapinya dengan pengembangan sistem continuous monitoring (CM) bagi user di first line dan second line dalam menerapkan pendekatan three lines of defense. Penerapan CM diharapkan akan meningkatkan process improvement pengelolaan keuangan sektor publik di level manajemen. Sementara, penerapan continuous audit (CA) untuk memastikan efektifitas pengelolaan risiko oleh manajemen K/L/P, sekaligus meningkatkan peran APIP sebagai third line, dilakukan melalui pengembangan data warehouse dan pengembangan sistem continuous audit (CA). Pengembangan sistem CA ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan data analytic di internal audit yang pada akhirnya meningkatkan business intelligence pengawasan sektor publik. Bagi BPKP, diharapkan dengan adanya pengembangan data warehouse FMIS NG dapat mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas big data SIMA dan meningkatkan penerapan business intelligence pengawasan BPKP atas pengelolaan pengeluaran keuangan pemerintah daerah secara nasional, serta memperkuat kualitas rekomendasi kepada Presiden RI.

Pada pengawasan program pembangunan, penyelenggaraan STAR AF diarahkan untuk meningkatkan penguatan Capaian STAR yang mencakup pedoman penerapan pengelolaan risiko untuk pemerintah daerah, serta pedoman pengawasan berbasis risiko. Dalam hal ini, capaian STAR dilanjutkan pemanfaatannya melalui: (i) pengembangan sistem informasi pengelolaan risiko yang selaras dengan enterprise architecture (EA) BPKP dan kebijakan SPBE nasional; (ii) pengembangan pengelolaan risiko pada program prioritas pembangunan

nasional 2020-2024; (iii) pengembangan pengukuran maturitas penerapan manajemen risiko sektor publik; dan (iv) pengembangan kompetensi teknis ICT dan pengelolaan risiko. Penerapan pengelolaan risiko pada program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan penerapan performance-based budgeting (PBB) pada proses bisnis perencanaan-penganggaran yang berorientasi pada capaian outcome (hasil), dan peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di seluruh proses pengelolaan keuangan negara/daerah (PFM). Pada akhirnya, diharapkan penerapan pengelolaan risiko sektor publik dapat meningkatkan penerapan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pengeluaran keuangan pemerintah.

STAR AF diharapkan berkontribusi secara langsung melalui upaya-upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah sebagaimana tercermin dalam target Rencana Strategis BPKP dan RPJMN 2020-2024 dan diharapkan dapat memberikan dampak dalam peningkatan kualitas laporan keuangan baik pusat maupun daerah sebagaimana tertuang dalam Project Administration Manual (PAM) STAR AF, yaitu opini WTP BPK di tahun 2025 sebesar 97% untuk K/L, 97% untuk provinsi, 90% untuk kabupaten/kota; Indeks Maturitas SPIP level 3 di tahun 2025 sebesar 100% untuk K/L dan pemerintah daerah; dan Peningkatan indeks kapabilitas APIP level 3 di tahun 2025 sebesar 85% untuk K/L dan Pemerintah daerah.

F.2.3. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri BPKP

Data umum dari masing-masing satuan kerja penerima PHLN adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	LK PHLN
1	Nama PHLN	State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF)
2	Pemberi Pinjaman	Asian Development Bank (ADB)
3	Nama Proyek	State Accountability Revitalization Additional Financing Project (STAR AF))
4	Loan ID	3872-INO
5	No. Register	17JE53EA
6	Date Sign	09 Desember 2019
7	Date Effective	15 Januari 2020
8	Closing Date	30 September 2015
9	Loan Amount	USD 90.000.000,00
10	Disbursement s.d. 2022	Rp2.878.506.000,00
11	Disbursement pada tahun 2022	Rp2.878.506.000,00
12	Belanja Tahun 2022 (Rupiah)/ Realisasi Netto	Rp2.824.922.539,00
	a. Belanja Pegawai	Rp0,00
	b. Belanja Barang	Rp1.728.940.206,00
	c. Belanja Modal	Rp1.095.982.333,00
	d. Belanja Bansos	Rp0,00
13	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	Rp0,00
	b. Aset Tetap	Rp479.881.403,00
	c. Aset Lainnya	Rp614.402.630.00
	d. Kewajiban	Rp0,00
14	Executing Agency	Sekretaris Utama BPKP
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK

F. 3 Informasi Data Hibah Luar Negeri

F.3.1. Latar Belakang

Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF) II yang dimulai pada bulan Maret 2016 dengan nilai *Grant Agreement* TF0A1903, sebesar USD 2,700,000, sepanjang perjalanan programnya telah melakukan realisasi penggunaan dana sebesar 81.11% atau sekitar USD 2,190,000 untuk membiayai 4 pilar Utama yang dijalankan oleh 7 Unit Kementerian/Lembaga. PFM-MDTF II dinyatakan selesai secara keseluruhan pada bulan Agustus 2020 dengan pemberian rating "*Satisfactory*" dalam laporan *Implementation Completion Report* (ICR) yang disusun bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.

Tiga jenjang rapat tahunan yang digelar sepanjang tahun 2020 yaitu rapat *Government of Indonesia – Management Committee Representatives* (Gol-MCR) pada bulan September 2020, rapat *Management Committee* (MC) pada bulan Oktober 2020 dan rapat *Partnership Council* (PC) pada bulan November 2020 telah menghasilkan keputusan untuk melanjutkan Proyek PFM-MDTF ke tahap III.

Proyek PFM-MDTF III dimulai dengan diberikannya persetujuan dan arahan langsung oleh Menteri Keuangan, saat memimpin rapat *Partnership Council* tanggal 11 November 2020. Sementara itu, pengesahan dinyatakan dengan terbitnya *Grant Agreement* dengan nomor TF0B5420 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Perwakilan Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Perwakilan negara Donor melalui Bank Dunia) pada tanggal 18 Mei 2021.

F.3.2. Tujuan dan Sasaran

Proyek PFM-MDTF III menitikberatkan pada tujuan untuk mendukung pemerintah .Indonesia dalam meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan dan belanja negara, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi.

Kementerian/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam PFM-MDTF III adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
2. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
5. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
6. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas
7. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas

Adapun fokus utama masing-masing Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam PFM-MDTF III sebagai berikut:

1. Revenue Policy and Management
 - o Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
2. Expenditure Policy and Management
 - o Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
 - o Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
 - o Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 3. Sub-National Public Resources and Management
 - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
 - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
- 4. Digital Technology Foundations and Platforms
 - Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
- 5. Enhance Gender Equality
 - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas

F.2.3. Ikhtisar Laporan Keuangan Hibah Luar Negeri BPKP

No	URAIAN	LK PHLN
1	Nama Hibah Luar Negeri	Hibah Luar Negeri Bank Dunia Nomor TF0B5420 untuk Kegiatan <i>Public Financial Management-Multi Donor Trust Fund (PFM-MDTF)</i> Tahap III
2	Pemberi Hibah	<i>International Bank for Reconstruction & Development</i>
3	Nama Proyek	<i>Public Finance Management III Support to Government of Indonesia Project</i>
4	Grand ID	TF0B5420
5	No. Register	2FPJR4SA
6	<i>Date Sign</i>	18 Mei 2021
7	<i>Date Effective</i>	18 Mei 2021
8	<i>Closing Date</i>	30 Juni 2025
9	<i>Grand Amount</i>	USD3.259.000 (ini total di Kemenkeu)
10	<i>Disbursement</i> s.d.tahun 2022	Rp1.064.518.000,00
11	<i>Disbursement</i> pada tahun 2022	Rp1.064.518.000,00
12	Belanja Tahun 2022 (Rupiah)	Rp72.528.777,00
	a. Belanja Pegawai	Rp0,00
	b. Belanja Barang	Rp72.528.777,00
	c. Belanja Modal	Rp0,00
	d. Belanja Bansos	Rp0,00
13	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	Rp0,00
	b. Aset Tetap	Rp0,00
	c. Aset Lainnya	Rp0,00
	d. Kewajiban	Rp0,00
14	<i>Executing Agency</i>	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 089

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DKI JAKARTA

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tgl Data 25/01/23 1:26 AM
Tgl. Cetak 25/01/2023 7:33 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	317,728,156	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	123,312,399	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	324,000	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1,698,300	0
JUMLAH			29,216,006,906	29,216,006,906

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 0100

SATUAN KERJA : 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DKI JAKARTA

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tgl Data 25/01/23 1:32 AM

Tgl. Cetak 25/01/2023 7:34 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	21,072,697,131
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	42,542,159	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,542,159
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,853,234,415	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	6,580,772
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	67,414	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,305
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	294,533,540	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	775,568
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	78,940,847	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	155,112
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	60,620,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	727,490,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	4,400,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	48,887,127	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	210,380,100	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	869,040
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	591,502,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	58,325,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,200
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	78,967,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7,995,842,467	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	254,966,216	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,573,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	184,912,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	87,855,598	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	433,590,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	589,078,963	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	17,044,409	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	20,202,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	80,400,933	0
3.0	522141	Belanja Sewa	16,291,201	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	180,543,750	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	184,176,597	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,718,952,489	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	1,560,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	304,130,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 089
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DKI JAKARTA
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tgl Data 25/01/23 1:32 AM

Tgl. Cetak 25/01/2023 7:34 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	150,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	471,812,250	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	360,000
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	342,225,973	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	7,885,370
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	582,808,009	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	625,821,200	0
JUMLAH			21,138,716,657	21,138,716,657

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 089
ESELON I : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 01
SATUAN KERJA : PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR 636702

Waktu Olap: 2023-01-25 01:31:40.0 JB@3669d29f
Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 26/01/23 7:33 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_saker_komparatif-SAKTI

NO	URAIAN	2022						2021					
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%				
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6				
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0				
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0				
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	42,542,159	42,542,159	0	0	13,821,646	13,821,646	0				
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0				
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	42,542,159	42,542,159	0	0	13,821,646	13,821,646	0				
B	BELANJA				0				0				
	BELANJA PEGAWAI	15,250,960,000	14,985,267,913	(265,692,087)	98	14,322,274,000	14,261,995,085	60,278,915	100				
	BELANJA BARANG	4,974,956,000	4,878,800,009	(96,155,991)	98	4,820,502,000	3,274,152,080	1,546,349,920	68				
	BELANJA MODAL	1,224,141,000	1,208,629,209	(15,511,791)	99	991,232,000	150,883,000	840,349,000	15				
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0				

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 089
ESELON I : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 01
SATUAN KERJA : PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR 636702

Waktu Olap: 2023-01-25 01:31:40.0 JB@504352715
Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 25/01/23 7:33 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_face_sakker_komparatif-SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	21,450,057,000	21,072,697,131	(377,359,869)	98	20,134,008,000	17,687,030,165	2,446,977,835	88
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089

UNIT ORGANISASI : 01

KDUAPPAW : 089010100KP

KODE SATKER : 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BA(089) ES1(01) DKI JAKARTA

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tgl Data 25/01/23 1:33 AM
Tgl. Cetak 25/01/2023 7:33 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	33,274,179	76,509,645	(43,235,466)	(56.51)
JUMLAH ASET LANCAR	33,274,179	76,509,645	(43,235,466)	(56.51)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	5,923,722,433	5,751,971,853	171,750,580	2.99
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,770,343,586)	(4,576,239,117)	(194,104,469)	4.24
JUMLAH ASET TETAP	1,153,378,847	1,175,732,736	(22,353,889)	(1.90)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,889,112,550	1,813,057,068	76,055,482	4.19
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	291,000,000	(291,000,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,322,525,623)	(1,348,401,042)	25,875,419	(1.92)
JUMLAH ASET LAINNYA	566,586,927	755,656,026	(189,069,099)	(25.02)
JUMLAH ASET	1,753,239,953	2,007,898,407	(254,658,454)	(12.68)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,753,239,953	2,007,898,407	(254,658,454)	(12.68)
JUMLAH EKUITAS	1,753,239,953	2,007,898,407	(254,658,454)	(12.68)
JUMLAH EKUITAS	1,753,239,953	2,007,898,407	(254,658,454)	(12.68)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,753,239,953	2,007,898,407	(254,658,454)	(12.68)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089

ESELON I : 01

WILAYAH/PROVINSI : 089010100KP

SATUAN KERJA : 636702

JENIS SATUAN KERJA : KP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BA(089) ES1(01) DKI JAKARTA

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Code Lap : LO.SAT

Tanggal : 25/01/23 7:33 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lo_satker –SAKTI

Tgl Data : 25/01/23 1:34 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	617,134	(617,134)	(100)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	617,134	(617,134)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	617,134	(617,134)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	14,985,267,913	14,261,995,085	723,272,828	5.071
Beban Persediaan	123,312,399	77,954,690	45,357,709	58.185
Beban Barang dan Jasa	1,788,755,437	1,610,055,443	178,699,994	11.099
Beban Pemeliharaan	184,500,597	114,253,604	70,246,993	61.483
Beban Perjalanan Dinas	2,827,165,342	1,423,038,613	1,404,126,729	98.671
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 089010100KP
SATUAN KERJA : 636702
JENIS SATUAN KERJA : KP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BA(089) ES1(01) DKI JAKARTA
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 25/01/23 7:33 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_saiker --SAKTI
Tgl Data : 25/01/23 1:34 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	921,191,754	1,170,604,208	(249,412,454)	(21.306)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	20,830,193,442	18,657,901,643	2,172,291,799	11.643
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(20,830,193,442)	(18,657,284,509)	(2,172,908,933)	11.646
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	42,542,159	13,204,512	29,337,647	222.179
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	42,542,159	13,204,512	29,337,647	222.179
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	42,542,159	13,204,512	29,337,647	222.179
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(20,787,651,283)	(18,644,079,997)	(2,143,571,286)	11.497
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(20,787,651,283)	(18,644,079,997)	(2,143,571,286)	11.497

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KP
SATUAN KERJA : 636702 PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tgl Data : 25/01/23 1:35 AM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 25/01/23 7:33 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker -SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,007,898,407	2,698,329,156	(690,430,749)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20,787,651,283)	(18,644,079,997)	(2,143,571,286)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	20,532,992,829	17,953,649,248	2,579,343,581	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(254,658,454)	(690,430,749)	435,772,295	-
EKUITAS AKHIR	1,753,239,953	2,007,898,407	(254,658,454)	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
ESELON I : 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 636702 PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 25/01/23 7:35 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_sakker--rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	42,542,159	0	42,542,159	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,542,159	0	42,542,159	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	42,542,159	0	42,542,159	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	42,542,159	0	42,542,159	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	42,542,159	0	42,542,159	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 636702
JENIS SATUAN KERJA : KP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DKI JAKARTA
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/01/23 7:36 AM
Halaman : 1
Prj ID : lap_lra_bel_akun_saker
Tgl Data : 25/1/23 1:28 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.854.428.000	4.853.663.000	4.853.234.415	6.580.772	4.846.653.643	99.99	7.009.357
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	100.000	69.000	67.414	1.305	66.109	97.7	2.891
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	350.000.000	294.548.000	294.533.540	775.568	293.757.972	100	790.028
511121	Belanja Tunj. Suamistri PNS	98.000.000	79.008.000	78.940.847	155.112	78.785.735	99.92	222.265
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	139.700.000	60.620.000	60.620.000	0	60.620.000	100	0
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	707.840.000	727.490.000	727.490.000	4.400.000	723.090.000	100	4.400.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	44.000.000	48.889.000	48.887.127	0	48.887.127	100	1.873
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	234.000.000	210.381.000	210.380.100	869.040	209.511.060	100	869.940
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	820.260.000	595.450.000	591.502.000	0	591.502.000	99.34	3.948.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	49.000.000	58.325.000	58.325.000	740.200	57.584.800	100	740.200
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7.297.328.000	6.928.443.000	6.923.980.443	13.521.997	6.910.458.446	99.94	17.984.554
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111							
5122	Belanja Lembur	25.272.000	90.851.000	78.967.000	0	78.967.000	86.92	11.884.000
512211	Belanja Uang Lembur	25.272.000	90.851.000	78.967.000	0	78.967.000	86.92	11.884.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122							
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	7.080.000.000	8.231.666.000	7.995.842.467	0	7.995.842.467	97.14	235.823.533
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7.080.000.000	8.231.666.000	7.995.842.467	0	7.995.842.467	97.14	235.823.533
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	14.402.600.000	15.250.960.000	14.998.789.910	13.521.997	14.985.267.913	98.35	265.692.087
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	266.220.000	258.821.000	254.966.216	0	254.966.216	98.51	3.854.784
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12.000.000	3.000.000	2.573.000	0	2.573.000	85.77	427.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	200.520.000	184.912.000	184.912.000	0	184.912.000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	476.740.000	446.733.000	442.451.216	0	442.451.216	99.04	4.281.784
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211							
5212	Belanja Barang Non Operasional	140.921.000	90.532.000	87.855.598	0	87.855.598	97.04	2.676.402
521211	Belanja Bahan	399.870.000	434.870.000	433.590.000	0	433.590.000	99.71	1.280.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	50.000.000	592.321.000	589.078.963	0	589.078.963	99.45	3.242.037
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	49.400.000	19.499.000	17.044.409	0	17.044.409	87.41	2.454.591
521241	Belanja Barang Non Operasional - Peranganan Pandemi	0	20.203.000	20.202.000	0	20.202.000	100	1.000
521252	Belanja Perlatan dan Mesin - Ekstrakomplabel				0		99.17	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	640.191.000	1.157.425.000	1.147.770.970	0	1.147.770.970		9.654.030
5218	Belanja Barang Persediaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 636702
JENIS SATUAN KERJA : KP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DKI JAKARTA
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/01/23 7:36 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 25/1/23 1:28 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO			
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	166,661,000	80,441,000	80,400,933	0	80,400,933	99.95	40,067	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	166,661,000	80,441,000	80,400,933	0	80,400,933	99.95	40,067	
5221	Belanja Jasa	0	16,292,000	16,291,201	0	16,291,201	100	799	
522141	Belanja Sewa	79,700,000	218,626,000	180,543,750	0	180,543,750	82.58	38,082,250	
522151	Belanja Jasa Profesi	79,700,000	234,918,000	196,834,951	0	196,834,951	83.79	38,083,049	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221								
5231	Belanja Pemeliharaan	328,170,000	196,230,000	184,176,597	0	184,176,597	93.86	12,053,403	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	328,170,000	196,230,000	184,176,597	0	184,176,597	93.86	12,053,403	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231								
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,025,132,000	1,725,155,000	1,718,952,489	1,560,000	1,717,392,489	99.64	7,762,511	
524111	Belanja Perjalanan Biasa	335,580,000	304,496,000	304,130,000	150,000	303,980,000	99.88	516,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,760,000	474,358,000	471,812,250	360,000	471,452,250	99.46	2,905,750	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	355,200,000	342,225,973	7,885,370	334,340,603	96.35	20,859,397	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,392,472,000	2,859,209,000	2,837,120,712	9,955,370	2,827,165,342	99.23	32,043,658	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,085,934,000	4,974,956,000	4,888,755,379	9,955,370	4,878,800,009	98.27	96,155,991	
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52								
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	582,861,000	582,808,009	0	582,808,009	99.99	52,991	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	582,861,000	582,808,009	0	582,808,009	99.99	52,991	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321								
5361	Belanja Modal Lainnya	0	641,280,000	625,821,200	0	625,821,200	97.59	15,458,800	
536111	Belanja Modal Lainnya	0	641,280,000	625,821,200	0	625,821,200	97.59	15,458,800	
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361								
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	1,224,141,000	1,208,629,209	0	1,208,629,209	98.73	15,511,791	
	JUMLAH BELANJA	17,488,534,000	21,450,057,000	21,096,174,498	23,477,367	21,072,697,131	98.35	377,359,869	

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 089
UAKPB : 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tanggal : 25/01/23 7:37 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT		SALDO PER 1 JANUARI 2022				MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
KODE	URAIAN	3	KUANTITAS		NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS		NILAI		
			4	5		6	7	8	9	10	11			
1														
132111	Peralatan dan Mesin		823	5,751,971,853	50	581,109,709	62	409,359,129	811	5,923,722,433				
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,085,950,500	0	0	0	0	5	1,085,950,500				
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	38,900,000	0	0	0	0	2	38,900,000				
3050102002	Mesin Hitung Listrik	Buah	1	1,249,600	0	0	0	0	1	1,249,600				
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000				
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	32,486,000	0	0	0	0	1	32,486,000				
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	1	62,315,000	0	0	0	0	1	62,315,000				
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	21	54,302,180	0	0	0	0	21	54,302,180				
3050104002	Lemari Kayu	Buah	37	108,172,863	0	0	0	0	37	108,172,863				
3050104003	Rak Besi	Buah	11	13,695,000	0	0	0	0	11	13,695,000				
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	8	18,789,766	0	0	0	0	8	18,789,766				
3050104007	Brandkas	Buah	3	23,694,976	0	0	0	0	3	23,694,976				
3050104015	Locker	Buah	1	1,430,000	0	0	0	0	1	1,430,000				
3050105010	White Board	Buah	3	144,043	0	0	0	0	3	144,043				
3050105013	Copy Board/Elektic White Board	Buah	2	20,686,599	0	0	0	0	2	20,686,599				
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	4	9,723,742	0	0	0	0	4	9,723,742				
3050105038	Laser Pointer	Buah	7	4,562,400	0	0	0	0	7	4,562,400				
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	25,610,000	6	97,685,550	0	0	8	123,295,550				
3050105052	Alat Peretakam Suara (Voice Pen)	Buah	0	0	1	2,019,000	0	0	1	2,019,000				
3050105099	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	44	28,800,000	0	0	0	0	44	28,800,000				
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	100	301,139,696	0	0	0	0	100	301,139,696				
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	174	90,261,558	0	0	0	0	174	90,261,558				
3050201005	Sice	Buah	16	51,361,645	0	0	0	0	16	51,361,645				
3050201008	Meja Rapat	Buah	2	8,930,619	0	0	0	0	2	8,930,619				
3050203005	Air Cleaner	Buah	2	7,062,000	0	0	0	0	2	7,062,000				
3050204001	Lemari Es	Buah	2	3,672,500	0	0	0	0	2	3,672,500				
3050205001	Kompot Listrik (Alat Dapur)	Buah	1	440,000	0	0	0	0	1	440,000				
3050206002	Televisi	Buah	3	41,630,000	2	54,415,800	0	0	5	96,045,800				
3050206010	Laser Disc	Buah	1	1,017,500	0	0	0	0	1	1,017,500				
3050206012	Wireless	Buah	1	1,540,000	0	0	0	0	1	1,540,000				
3050206014	Microphone	Buah	1	1,302,000	1	4,479,405	0	0	2	5,781,405				
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	0	0	4	13,388,134	0	0	4	13,388,134				
3050206020	Camera Video	Buah	1	32,198,000	0	0	0	0	1	32,198,000				
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	277,402	0	0	0	0	2	277,402				
3050206035	Kaca Hias	Buah	1	995,782	0	0	0	0	1	995,782				
3050206036	Dispenser	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000				
3050206046	Handy Cam	Buah	1	9,463,285	0	0	0	0	1	9,463,285				

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 089
UAKPB : 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tanggal : 25/01/23 7:37 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT		SALDO PER 1 JANUARI 2022				MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
KODE	URAIAN	3	Kuantitas		Nilai		Bertambah		Berkurang					
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1														
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,700,000	0	0	0	0	1	2,700,000				
3060101025	Audio Visual	Buah	3	30,635,000	0	0	0	0	3	30,635,000				
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	32	55,788,653	0	0	0	0	32	55,788,653				
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	4,230,000	1	1,504,605	0	0	3	5,734,605				
3060102003	Camera Electronic	Buah	2	18,507,281	0	0	0	0	2	18,507,281				
3060102045	Tripod Camera	Buah	0	0	1	1,298,700	0	0	1	1,298,700				
3060102128	Camera Digital	Buah	2	34,999,000	0	0	0	0	2	34,999,000				
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	1	1,350,000	0	0	0	0	1	1,350,000				
3060102158	Monopod	Buah	0	0	1	15,683,190	0	0	1	15,683,190				
3060102159	Clipp On	Buah	0	0	2	10,373,393	0	0	2	10,373,393				
3060102165	Camera Conference	Buah	2	7,895,000	1	5,320,230	0	0	3	13,215,230				
3060105047	Kamera Udara	Buah	1	27,720,000	0	0	0	0	1	27,720,000				
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	14	45,991,389	0	0	0	0	14	45,991,389				
3060201004	Telephone Mobile	Buah	0	0	1	4,606,722	0	0	1	4,606,722				
3060201010	Facsimile	Buah	2	2,562,446	0	0	0	0	2	2,562,446				
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	2	11,902,355	0	0	0	0	2	11,902,355				
3060323019	Power Distribution Board	Buah	2	10,480,000	0	0	0	0	2	10,480,000				
3060345001	Scanner Facsimile	Buah	1	2,585,000	0	0	0	0	1	2,585,000				
3070101155	UV Sterilizer	Buah	10	25,850,000	0	0	0	0	10	25,850,000				
3080113081	TV Monitor	Buah	1	24,000,000	0	0	0	0	1	24,000,000				
3080602046	Air Purifier	Buah	6	19,470,000	0	0	0	0	6	19,470,000				
3080715005	Lighting Equipment	Buah	0	0	1	4,484,400	0	0	1	4,484,400				
3090402031	Kamera Digital	Buah	0	0	1	60,060,000	0	0	1	60,060,000				
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	4	10,480,000	0	0	0	0	4	10,480,000				
3100102001	P.C Unit	Buah	96	1,257,032,929	4	138,795,950	26	202,287,109	74	1,193,541,770				
3100102002	Lap Top	Buah	0	0	2	71,678,000	0	0	2	71,678,000				
3100102003	Note Book	Buah	60	901,465,216	0	0	14	146,853,380	46	754,611,836				
3100102009	Tablet PC	Buah	1	13,813,300	2	10,695,960	0	0	3	24,509,260				
3100201012	Hard Disk	Buah	0	0	6	29,700,000	0	0	6	29,700,000				
3100202017	Speaker Komputer	Buah	0	0	1	16,192,680	0	0	1	16,192,680				
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	57	179,359,095	7	14,089,320	8	30,759,790	56	162,668,625				
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19	223,644,350	3	16,025,070	6	20,378,350	16	219,291,070				
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	30	40,102,497	0	0	8	9,080,500	22	31,021,997				
3100204001	Server	Buah	8	683,103,676	0	0	0	0	8	683,103,676				
3100204030	Network Cable Tester	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000				
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	0	0	2	8,613,600	0	0	2	8,613,600				
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		0	0	62	409,359,129	62	409,359,129	0	0				

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 089
UAKPB : 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tanggal : 25/01/23 7:37 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACASUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100102001	P.C Unit	Buah	0	0	26	202,287,109	26	202,287,109	0	0
3100102003	Note Book	Buah	0	0	14	146,853,380	14	146,853,380	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	8	30,759,790	8	30,759,790	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	6	20,378,350	6	20,378,350	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	0	0	8	9,080,500	8	9,080,500	0	0
TOTAL				5,751,971,853		990,468,838		818,718,258		5,923,722,433

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

UAPB : 089
UAKPB : 636702

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Tanggal : 25/01/23 7:39 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	4,594,625
1010301003	Penjepit Kertas	343,750
1010301004	Penghapus/Korektor	48,070
1010301005	Buku Tulis	61,050
1010301006	Ordner Dan Map	8,095,285
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	244,000
1010301010	Alat Perekat	1,297,495
1010301011	Stadler HD	96,250
1010301013	Isi Staples	80,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	2,574,675
1010302001	Kertas HVS	3,444,489
1010302002	Berbagai Kertas	774,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	11,500,490
1010306010	Batu Baterai	120,000
Jumlah Barang Konsumsi		33,274,179
TOTAL		33,274,179

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp.
- 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp.
- 0 dalam kondisi usang.